

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahasiswa selalu punya tempat tersendiri ketika kita berbicara terkait perubahan sosial di masyarakat. Sebagai kelompok terdidik yang masih muda, mereka cenderung peka dan kritis terhadap persoalan sosial maupun politik di sekitarnya. Posisi ideal mahasiswa sebagai *agent of change* sebetulnya bukan sekadar menjadi peserta di bangku kuliah, melainkan juga menjadi pengawas sosial (*social control*) sekaligus pendorong ketika ada kebijakan pemerintah yang perlu dikawal (Amri, 2023). Dengan posisi idealnya, mahasiswa diharapkan dapat menghubungkan apa yang dipelajari di ruang akademik dengan persoalan nyata di lapangan, sehingga kehadiran mereka ikut menyumbang dalam terbentuknya tatanan sosial yang lebih adil dan demokratis.

Di tengah kehidupan yang demokratis, mahasiswa seringkali tampil sebagai wajah anak muda yang berani mengkritik ketimpangan, entah itu di ranah sosial, ekonomi, maupun politik. Salah satu wujud paling nyata dari peran *agent of change* ini terlihat dari bagaimana mereka ikut andil bagian dalam aksi kolektif (*collective action*). Aksi kolektif dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok individu demi memperjuangkan kepentingan kelompoknya, atau menuntut adanya perbaikan atas kondisi sosial yang mereka anggap timpang (Agraprana dkk., 2022). Aksi semacam ini biasanya lahir dari situasi tertentu yang membangkitkan kesadaran bersama bahwa ada sesuatu yang harus diubah.

Bagi mahasiswa, aksi kolektif menjadi ruang untuk menyuarakan sikap dan menuntut perbaikan atas ketidakadilan melalui berbagai bentuk partisipasi, seperti demonstrasi, protes, kampanye sosial, advokasi kebijakan, penandatanganan petisi, maupun bentuk partisipasi publik lainnya (van Zomeren dkk., 2008). Dalam penelitian ini, aksi kolektif yang dimaksud mengacu pada *general collective action*, yaitu berbagai tindakan yang dilakukan secara bersama-sama untuk memperjuangkan perubahan sosial, politik, atau kebijakan yang dianggap tidak adil. Sehingga, aksi kolektif tidak terbatas pada demonstrasi di jalan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk partisipasi kolektif lainnya yang

bertujuan mendorong perubahan, seperti petisi, boikot, dan lain-lain. Konteks penelitian ini, fokus pembahasan terletak pada keterlibatan mahasiswa dalam tindakan kolektif sebagai bagian dari suatu kelompok yang memiliki tujuan bersama, bukan pada dinamika psikologis individu ketika melakukan tindakan secara personal. Sehingga keterlibatan mahasiswa dipahami sebagai partisipasi dalam berbagai bentuk aksi bersama untuk memperjuangkan perubahan sosial maupun kebijakan publik. Sebagai contoh, ketika mahasiswa memandang suatu sistem tidak berjalan secara meritokrasi, misalnya karena suatu kebijakan dianggap lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat luas, mereka dapat memilih untuk terlibat dalam berbagai bentuk aksi kolektif sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dirasakan.

Jika kita menengok ke belakang, mahasiswa Indonesia memiliki jejak yang cukup kuat dalam perjalanan perubahan sosial dan politik bangsa. Gerakan mahasiswa sejak 1966 sampai Reformasi 1998 menjadi bukti nyata bahwa mereka menempati posisi strategis sebagai pengawas sosial (*social control*) sekaligus penggerak yang mampu memengaruhi arah kebijakan negara dan mendorong perubahan sistem sosial-politik (Maiwan, 2014). Mahasiswa kerap menempatkan diri mereka sebagai kelompok yang tanggap terhadap persoalan publik, terutama yang menyangkut ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesenjangan sosial. Karena itu, mahasiswa tidak cukup hanya dilihat sebagai bagian dari *civitas academica*, tetapi juga sebagai aktor sosial yang berpihak pada nilai demokrasi, keadilan, dan kepentingan masyarakat (Supriyanto, 2022).

Salah satu contoh aksi kolektif yang mencerminkan dinamika tersebut adalah gelombang demonstrasi penolakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang mencapai puncaknya pada 8 Oktober 2020. Mahasiswa menilai proses penyusunan maupun substansi kebijakan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan meritokrasi karena dianggap lebih menguntungkan pengusaha dan investor dibandingkan kepentingan pekerja maupun masyarakat luas. Persepsi mengenai adanya ketidakadilan tersebut kemudian mendorong berbagai bentuk aksi kolektif, mulai dari demonstrasi, penyampaian aspirasi, kampanye di media sosial, advokasi kebijakan, hingga penandatanganan petisi sebagai upaya bersama untuk

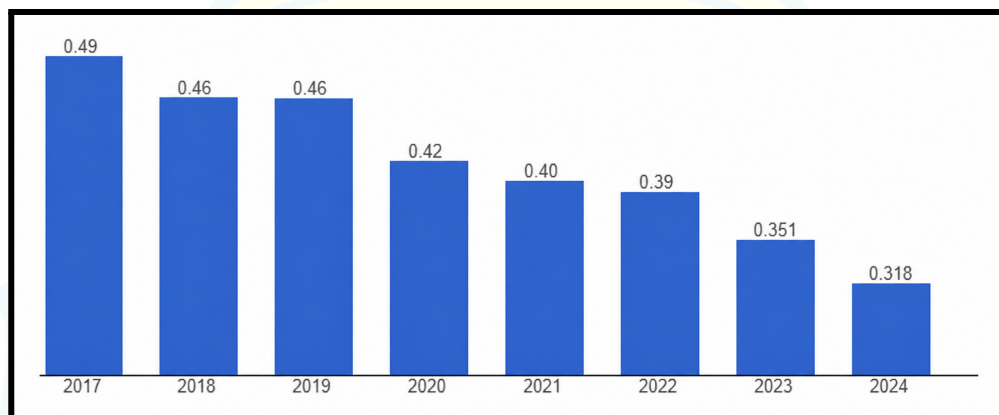
mendorong perubahan kebijakan. Fenomena serupa kembali terlihat pada aksi mahasiswa bertajuk "Indonesia Menuju Bangkrut" yang diselenggarakan pada 12 Juni 2026. Demonstrasi tersebut dipicu oleh berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat, seperti kenaikan harga BBM, meningkatnya biaya hidup, prioritas anggaran pemerintah yang dipersoalkan, serta kekhawatiran terhadap arah tata kelola pemerintahan. Berbagai isu tersebut memunculkan persepsi bahwa kebijakan publik belum sepenuhnya disusun secara adil dan akuntabel sehingga mendorong mahasiswa untuk kembali melakukan mobilisasi aksi kolektif sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah.

Kedua fenomena tersebut menunjukkan bahwa aksi kolektif dalam penelitian ini dipahami sebagai berbagai bentuk tindakan bersama (*general collective action*), bukan hanya demonstrasi semata. Runtuhnya kepercayaan terhadap sistem secara bertahap dapat memperkuat identifikasi kelompok di kalangan mahasiswa, meningkatkan persepsi ketidakadilan kolektif, sekaligus mengukuhkan efikasi kolektif, yaitu keyakinan bahwa tindakan bersama mampu membawa perubahan sosial dan politik. Demonstrasi menjadi sarana menyuarakan aspirasi sekaligus jalan alternatif ketika saluran komunikasi formal dinilai tidak mampu mengakomodasi tuntutan masyarakat secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memainkan peran penting sebagai pengawas kebijakan negara melalui mobilisasi aksi kolektif (Abdad, 2022). Dalam kerangka ini, demonstrasi bukan sekadar cara menyampaikan pendapat di muka umum, melainkan juga merupakan wujud partisipasi politik mahasiswa dalam kehidupan demokratis.

Berpartisipasi dalam aksi kolektif merupakan salah satu bentuk *civic engagement*, yaitu upaya yang dilakukan secara berkelompok untuk mendukung perubahan sosial atau kepentingan kelompok (Soleh, Fajriah, & Rahman, 2024). *Civic engagement* atau partisipasi warga negara adalah komponen penting dari sistem demokratis yang memungkinkan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat sering menggunakan demonstrasi sebagai salah satu bentuk aksi kolektif untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Secara historis, mahasiswa telah lama diakui di Indonesia sebagai *agen perubahan* yang penting dalam memantau kebijakan pemerintah dan membela kepentingan masyarakat umum. Sehingga, mahasiswa

diharapkan untuk secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan aksi kolektif sebagai tanda tanggung jawab sipil dan sosial mereka.

Namun, menurut data statistik dari *Participatory Democracy Index* yang diambil dari *Varieties of Democracy* (V-Dem) menggambarkan bahwa skor negara Indonesia turun dari 0,351 di tahun 2023 menjadi 0,318 di tahun 2024. Terlebih data statistik ini menggambarkan kecenderungan tingkat penurunan pada tahun 2017 di angka 0,49 menjadi 0,318 di tahun 2024. Berikut adalah grafik data statistik *Participatory Democracy Index*:



Gambar 1.1 Data *Participatory Democracy Index*

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat adanya penurunan *Participatory Democracy Index* yang mengindikasikan pelemahan keterlibatan warga negara Indonesia dalam berbagai mekanisme partisipasi demokratis. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan terhadap partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi. Apabila penurunan partisipasi tersebut terus berlanjut, kualitas demokrasi berpotensi mengalami kemunduran karena rendahnya keterlibatan warga negara dapat melemahkan *civic engagement* sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Melemahnya *civic engagement* juga berpotensi mengurangi fungsi kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan berkembangnya praktik pemerintahan yang cenderung otoriter. Dalam konteks tersebut, mahasiswa diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bentuk aksi kolektif sebagai kelompok yang memiliki kapasitas intelektual dan posisi strategis dalam masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa memiliki tingkat keterlibatan yang

sama dalam aksi kolektif. Sebagian mahasiswa aktif berpartisipasi dalam gerakan sosial dan aksi kolektif, sementara sebagian lainnya masih enggan untuk terlibat.

Ditambah ironisnya dengan temuan-temuan pada di lapangan bahwa kualitas keterlibatan yang ada justru kerap diwarnai tindakan destruktif, seperti perusakan fasilitas umum dan bentrokan dengan aparat. Fenomena ini menggambarkan paradoks antara idealisme mahasiswa sebagai *agent of change* dengan realitas aksi kolektif yang kian kehilangan orientasi normatifnya (García-Sierra, 2023). Alih-alih menjadi jalan untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif, sebagian aksi kini berubah menjadi luapan kemarahan yang tak terarah, mulai dari tindakan anarkis, kerusuhan, sampai perusakan fasilitas umum. Akibatnya, makna aksi kolektif sebagai sarana perjuangan sosial dan penyampaian aspirasi demokrasi pun ikut bergeser. Aksi yang semestinya memperjuangkan kepentingan masyarakat justru sering dicap negatif karena munculnya perilaku yang bertabrakan dengan nilai ketertiban, moralitas, dan kepentingan umum.

Menurut teori *Social Identity Model of Collective Action* (SIMCA) ada tiga faktor utama yang dapat memengaruhi keterlibatan individu dalam aksi kolektif, yaitu identitas sosial, persepsi ketidakadilan kolektif, dan efikasi kolektif (Setiawan & Handayani, 2025). Identitas sosial menunjuk pada bagian dari konsep diri yang terbentuk melalui keanggotaan individu dalam sebuah kelompok atau komunitas. Sehingga, kondisi ini menumbuhkan rasa memiliki, solidaritas, dan ikatan emosional terhadap kelompok tersebut. Rupert Brown menyatakan bahwa identitas kelompok merupakan faktor penentu keterlibatan dalam aksi kolektif, sebab partisipasi individu tidak hanya didorong oleh kepentingan pribadi, tetapi juga oleh nilai dan identitas kelompok yang sudah terinternalisasi dalam diri individu tersebut (Laka dkk., 2024). Pada mahasiswa, ketika individu merasa dirinya bagian dari kelompok tersebut, maka ia akan peduli pada isu sosial, rasa loyal, solidaritas, dan orientasi pada kepentingan bersama akan tumbuh. Sehingga, hal ini yang membuat identitas sosial menjadi pendorong penting bagi keterlibatan mereka.

Secara konseptual, identitas sosial tidak berhenti pada soal keanggotaan, tetapi juga mencakup nilai, norma, dan kedekatan emosional yang melekat di dalam kelompok. Begitu identitas kelompok terasa semakin kuat, seseorang

cenderung semakin terlibat pada tujuan bersama dan rela menaruh kepentingan kelompok di atas kepentingan dirinya sendiri (Ramadhan dkk., 2025). Kondisi seperti inilah yang menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang dirasakan dalam masyarakat. Kesadaran bersama itulah yang kemudian menyalakan aksi kolektif, terutama jika mahasiswa meyakini bahwa perubahan hanya bisa dicapai lewat tindakan bersama (Jamilah, 2004). Bahkan, identitas sosial turut menentukan seberapa intens dan seberapa kuat sebuah aksi bertahan, lewat ikatan emosional, persepsi ketidakadilan, serta keyakinan akan efektivitas tindakan bersama.

Begitu mahasiswa melihat ada hak-hak publik yang dilanggar atau kebijakan yang dirasa tidak memihak pada masyarakat khalayak, maka akan muncul persepsi terkait ketidakadilan secara kolektif. Persepsi ini akan membangkitkan rasa kecewa, amarah, dan solidaritas bersama yang justru memperkuat mobilisasi massa dalam aksi kolektif. Sehingga, aksi kolektif tidak hanya dipahami sebagai reaksi atas kondisi nyata, tetapi juga sebagai hasil dari cara individu dan kelompok memaknai situasi sosial yang mereka anggap tidak adil (Sukmana dkk., 2025).

Di sisi lain, perilaku agresif muncul dalam aksi kolektif yang dipicu banyak hal sekaligus, mulai dari deindividuasi, konformitas kelompok, frustrasi kolektif, sampai provokasi situasional. Deindividuasi membuat kontrol diri seseorang menurun ketika ia larut dalam kerumunan besar, sehingga tindakannya kerap lepas dari pertimbangan moral maupun hukum (Monica dkk., 2025). Dalam situasi massa, identitas pribadi melemah dan tergantikan oleh identitas kelompok, sehingga di titik inilah perilaku agresif lebih mudah muncul sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kelompok. Konformitas kelompok pun mendorong individu mengikuti norma dan perilaku kelompoknya agar diterima dan demi menjaga solidaritas. Akibatnya, seseorang bisa saja melakukan hal yang sebenarnya berlawanan dengan nilai pribadinya hanya karena tekanan sosial yang terjadi dalam kelompok (Elza, 2025).

Sejalan dengan hal itu, frustrasi kolektif yang lahir dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah juga dapat berubah menjadi dorongan agresif sebagai pelampiasan emosi. Ketika tuntutan kelompok tidak ditanggapi sesuai

harapan mereka, maka perasaan kekecewaan, kemarahan, dan frustrasi dapat menumpuk dan akhirnya pecah menjadi tindakan agresif saat demonstrasi. Dalam aksi kolektif pada lapangan kerap ada oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan momentum untuk memperkeruh suasana dan provokasi, sehingga hal tersebut dapat semakin memperkuat agresivitas yang terjadi saat demonstrasi massa.

Meskipun mahasiswa secara normatif dipandang sebagai *agent of change*, pada kenyataannya tidak semua mahasiswa memilih untuk terlibat dalam aksi kolektif. Sebagian mahasiswa aktif mengikuti demonstrasi, advokasi kebijakan, kampanye sosial, maupun bentuk partisipasi kolektif lainnya, sedangkan sebagian lainnya memilih untuk tidak terlibat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan dalam aksi kolektif tidak semata-mata ditentukan oleh adanya isu sosial atau kebijakan yang dipandang bermasalah, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana mahasiswa memaknai dan mengevaluasi kondisi sosial yang dihadapinya. Dengan kata lain, individu dapat memberikan respons yang berbeda terhadap situasi sosial yang sama karena memiliki cara pandang, keyakinan, dan penilaian yang berbeda terhadap sistem sosial.

Dari perspektif psikologi sosial, keterlibatan individu dalam aksi kolektif merupakan hasil dari integrasi tiga proses mental atau konstruk psikologis, yaitu proses kognitif, afektif, dan konatif (Dasweni dkk., 2026). Ketiga proses tersebut bekerja secara berurutan dalam membentuk perilaku individu. Proses kognitif menjadi tahap awal ketika individu menangkap, memahami, dan mengevaluasi kondisi sosial di sekitarnya, seperti adanya ketidakadilan, ketimpangan kebijakan, atau berbagai persoalan sosial yang dianggap merugikan masyarakat (Fikri, 2024). Hasil evaluasi tersebut kemudian memunculkan respons afektif berupa emosi, seperti kemarahan, kekecewaan, maupun empati terhadap kelompok yang terdampak. Selanjutnya, respons emosional tersebut berkembang menjadi proses konatif yang diwujudkan melalui niat, komitmen, dan keputusan untuk terlibat dalam berbagai bentuk aksi kolektif. Sehingga, keterlibatan mahasiswa dalam aksi kolektif tidak muncul secara spontan, melainkan melalui serangkaian proses psikologis yang diawali oleh cara individu mengevaluasi realitas sosial yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan perhatian pada proses kognitif, karena proses ini merupakan landasan yang mendahului munculnya respons afektif maupun konatif. Sebelum individu memutuskan untuk terlibat dalam aksi kolektif, individu terlebih dahulu membentuk penilaian terhadap sistem sosial yang dihadapinya, termasuk apakah sistem tersebut telah berjalan secara adil atau masih dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kemampuan dan usaha individu.

Keyakinan meritokrasi berada pada ranah kognitif dan menjadi salah satu faktor psikologis yang turut menentukan cara mahasiswa memandang ketimpangan sosial sekaligus keterlibatannya dalam aksi kolektif. Secara etimologis, meritokrasi berasal dari kata merit yang berarti kelayakan atau prestasi dan kratos yang berarti kekuasaan. Konsep ini merujuk pada keyakinan bahwa status sosial, keberhasilan, dan pencapaian individu ditentukan oleh kemampuan, kompetensi, serta kerja keras, bukan oleh faktor-faktor eksternal seperti koneksi politik, nepotisme, atau privilese tertentu (Mahendra & Mahmud, 2025). Secara normatif, meritokrasi dipandang sebagai sistem yang menjunjung keadilan prosedural karena memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk berhasil sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun, kondisi ideal tersebut tidak selalu tercermin dalam praktik kehidupan sosial.

Dalam praktiknya, sistem sosial tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip meritokrasi. Meskipun setiap individu seharusnya memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan usahanya, berbagai faktor non-merit, seperti nepotisme, kolusi, korupsi, privilese sosial, koneksi politik, diskriminasi, serta ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan masih sering memengaruhi distribusi kesempatan dalam masyarakat. Akibatnya, keberhasilan seseorang tidak selalu ditentukan oleh kompetensi dan kerja keras, melainkan juga oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali individu. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem sosial belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan meritokrasi. Ketika mahasiswa memandang bahwa keberhasilan lebih banyak ditentukan oleh faktor non-merit daripada kemampuan dan usaha, mereka cenderung mengevaluasi sistem sebagai sesuatu yang tidak adil sehingga memunculkan ketidakpercayaan terhadap institusi

maupun pemerintah (Fernandez, 2025). Persepsi tersebut dapat berkembang menjadi rasa frustrasi, kecewa, dan ketidakpuasan, terutama ketika proses penyusunan kebijakan, kepemimpinan, maupun pengambilan keputusan dinilai tidak transparan serta mengabaikan prinsip keadilan dan kompetensi (Tan, 2026). Kondisi inilah yang diduga meningkatkan kecenderungan mahasiswa untuk terlibat dalam aksi kolektif sebagai bentuk respons terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan.

Hal tersebut sejalan dengan *Relative Deprivation Theory* yang menjelaskan bahwa motivasi individu maupun kelompok untuk melakukan aksi kolektif tidak semata-mata dipengaruhi oleh kondisi objektif, tetapi oleh persepsi mengenai adanya kesenjangan antara kondisi yang dialami dengan kondisi yang dianggap seharusnya diperoleh. Ketika mahasiswa membandingkan harapan mengenai sistem yang adil dan meritokratis dengan realitas yang mereka rasakan, muncul persepsi deprivasi relatif yang memicu rasa tidak puas, marah, dan frustrasi. Dengan demikian, ketidakpuasan yang mendorong keterlibatan dalam aksi kolektif lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi subjektif terhadap ketimpangan daripada kondisi objektif itu sendiri (Truna & Zakaria, 2021).

Ketika mahasiswa membandingkan kondisi ideal terkait keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan kebijakan dengan apa yang sebenarnya terjadi, hal ini yang membuat terlahirnya rasa tidak puas dan tidak adil. Perbandingan sosial inilah yang kemudian memunculkan emosi kolektif yang kuat, seperti amarah, frustrasi, dan kekecewaan yang pada situasi tertentu dapat berkembang menjadi perilaku agresif saat demonstrasi. Maka, keterlibatan mahasiswa dalam aksi kolektif tidak hanya dipengaruhi faktor struktural, tetapi juga oleh persepsi psikologis terhadap ketimpangan yang mereka rasakan (Adit Mohammad Aziz dkk., 2025).

Mahasiswa dengan keyakinan meritokrasi yang kuat cenderung menilai ketimpangan sosial wajar terjadi karena perbedaan kemampuan, usaha, dan kompetensi setiap individu. Sehingga, mereka biasanya kurang tertarik terlibat dalam aksi kolektif, karena meyakini bahwa berhasil atau gagalnya individu ditentukan oleh faktor internal daripada faktor eksternal. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki keyakinan meritokrasi rendah, mereka cenderung kritis terhadap

sistem dan menganggap bahwa prinsip meritokrasi kerap dipakai hanya sebagai pembenaran dalam menutupi ketidakadilan sistemik (Wasino dkk., 2026). Dalam persepsi tersebut, keberhasilan individu tidak sepenuhnya bertumpu pada kemampuan dan usaha, tetapi juga dipengaruhi akses sosial, relasi kekuasaan, privilese, serta kebijakan yang belum tentu memberi kesempatan setara bagi semua orang.

Sehingga, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk merancang strategi pendidikan dan pembinaan karakter mahasiswa yang lebih tanggap terhadap tantangan sosial-politik. Harapannya, mahasiswa tetap mampu menjalankan peran sebagai *agent of change* yang konstruktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis. Penelitian ini diarahkan untuk menguji secara empiris hubungan keyakinan meritokrasi dan keterlibatan mahasiswa pada aksi kolektif.

Dari segi metodologis, penelitian ini penting untuk dilakukan karena kajian tentang perilaku kolektif selama ini lebih banyak menyoroti variabel identitas kelompok dan emosi kolektif. Sehingga dari sisi ideologis berupa keyakinan meritokrasi masih jarang diteliti secara mendalam di konteks keterlibatan mahasiswa pada aksi kolektif, khususnya penelitian di budaya Indonesia. Kajian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur psikologi sosial-politik di Indonesia, tetapi juga memberi gambaran tentang cara generasi muda merespons tantangan demokrasi di tengah dinamika kebijakan publik yang dinamis (Cho dkk., 2023).

Berangkat dari uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menelusuri lebih jauh dinamika antara aksi kolektif dan keyakinan meritokrasi. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat judul: “Hubungan Keyakinan Meritokrasi dan Keterlibatan Mahasiswa pada Aksi Kolektif.”

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang yang sudah dipaparkan, beberapa persoalan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua mahasiswa punya tingkat partisipasi yang sama dalam aksi kolektif, meskipun berada di lingkungan sosial dan kesempatan yang sama dalam akses informasi soal isu ketidakadilan.

2. Persepsi deprivasi relatif dapat mendorong munculnya niat untuk melakukan aksi kolektif.
3. Belum diketahui apakah frustrasi yang lahir dari sistem yang dinilai tidak meritokrasi oleh mahasiswa dapat mendorong keterlibatan mereka dalam aksi kolektif.
4. Keyakinan meritokrasi berpotensi memengaruhi cara individu memaknai ketimpangan sosial, bahkan dapat menumpulkan kepekaan terhadap ketidakadilan struktural.
5. Penelitian yang secara khusus menyoroti hubungan keyakinan meritokrasi dan keterlibatan mahasiswa pada aksi kolektif, terutama pada konteks budaya Indonesia masih terbatas.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian yang menguji hubungan keyakinan meritokrasi dan keterlibatan mahasiswa pada aksi kolektif, khususnya di Indonesia masih terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada pengujian keyakinan meritokrasi sebagai variabel independen dan aksi kolektif sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan instrumen *Meritocratic Perceptions and Preferences Measure* dan *Activism Orientation Scale (AOS)*.

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengajukan satu pertanyaan utama, yaitu “apakah ada hubungan keyakinan meritokrasi dan keterlibatan mahasiswa pada aksi kolektif?” Untuk pertanyaan masalah tersebut, penelitian ini menguji secara empiris hubungan keyakinan meritokrasi sebagai prediktor terhadap keterlibatan mahasiswa pada aksi kolektif.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris hubungan keyakinan meritokrasi dan keterlibatan mahasiswa pada aksi kolektif, khususnya konteks budaya Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pengembangan kajian psikologi sosial-politik, khususnya menyangkut hubungan keyakinan meritokrasi dan keterlibatan mahasiswa pada aksi kolektif di Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mahasiswa tentang pentingnya keyakinan meritokrasi yang tidak hanya dimengerti sebagai keyakinan terkait keberhasilan individu berdasarkan kemampuan dan usaha pribadi, tetapi juga sebagai faktor psikologis yang dapat membentuk kecenderungan mereka untuk terlibat dalam aksi kolektif sebagai respons atas ketimpangan yang dirasakan.

1.6.2.2 Bagi Penyelenggara Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah, perguruan tinggi, dan perusahaan mengenai faktor psikologis yang memengaruhi keterlibatan mahasiswa pada aksi kolektif. Bagi pemerintah dan kampus, pemahaman ini dapat dipakai untuk menyusun kebijakan dan program pendidikan yang menekankan peluang yang adil, partisipasi yang konstruktif, sekaligus mengarahkan mahasiswa menyalurkan aspirasinya secara positif melalui organisasi kemahasiswaan atau pengabdian masyarakat. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat membantu mengenali potensi mahasiswa yang memiliki motivasi internal dan kepedulian sosial tinggi yang berguna dalam strategi rekrutmen, pengembangan karyawan, dan program tanggung jawab sosial, serta membangun budaya kerja yang menghargai prestasi sekaligus kepedulian sosial.

1.6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji variabel psikologis lainnya terkait keterlibatan mahasiswa pada aksi kolektif, sehingga pengembangan kajian di bidang psikologi-sosial ini dapat lebih meluas, menyeluruh, dan berbasis temuan ilmiah.

